

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU PENGEMBANGAN DESA
WISATA “NOYO GIMBAL VIEW” DESA BANGSRI KECAMATAN JEPON
KABUPATEN BLORA**

Malis Furaida¹, Yuwanto²

Email : malisfuraida16@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Pengembangan desa wisata merupakan strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pariwisata. Desa Wisata Noyo Gimbal View di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, berkembang melalui pemanfaatan potensi alam, pertanian, kuliner, serta inovasi kegiatan budaya yang didukung penggunaan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap sosialisasi atau penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian. Pada tahap sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman mengenai potensi desa konsep desa wisata. Tahap transformasi kemampuan diwujudkan melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan wisata, pelayanan, serta pemanfaatan teknologi digital. Tahap kemandirian ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha wisata secara mandiri dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata terlihat dalam bentuk kontribusi tenaga, keterlibatan dalam pengelolaan usaha wisata, serta dukungan ide dan gagasan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata. Secara keseluruhan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Noyo Gimbal View Bangsri berperan penting dalam mendorong keberhasilan pengembangan desa wisata, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta memperkuat keberlanjutan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat, Desa Wisata.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Tourism village development is a local potential-based development strategy that positions the community as the primary actor in improving the welfare and sustainability of tourism. The Noyo Gimbal View Tourism Village in Bangsri Village, Jepon District, Blora Regency, has developed through the utilization of natural resources, agriculture, culinary arts, and innovative cultural activities supported by the use of digital media. This study aims to analyze the process of community empowerment and the forms of community participation in the development of this tourism village. The method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, and documentation.

The results of the study indicate that the community empowerment process in the Noyo Gimbal View Bangsri Tourism Village was implemented through three main stages, namely the socialization or awareness stage, the capacity transformation stage, and the independence stage. In the socialization stage, the community was given an understanding of the village's potential and the concept of a tourism village. The capacity transformation stage was realized through various forms of training and mentoring to increase community capacity in tourism management, services, and the use of digital technology. The independence stage was marked by the increasing ability of the community to manage tourism businesses independently and sustainably. Community participation in the development of the tourism village was seen in the form of labor contributions, involvement in the management of tourism businesses, and support for ideas and concepts in organizing tourism activities. Overall, community empowerment and participation in the Noyo Gimbal View Bangsri Tourism Village played an important role in encouraging the success of tourism village development, improving the community's economy, and strengthening the sustainability of tourism village management based on local potential.

Keywords: *Community Empowerment, Community Participation, Tourism Village.*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan dari sistem sentralistik menuju desentralistik pasca reformasi. Pada masa Orde Baru, hubungan pemerintah pusat dan daerah bersifat hierarkis dengan kewenangan daerah yang terbatas. Seluruh keputusan strategis, termasuk pembangunan daerah, ditentukan oleh pemerintah pusat sehingga sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Setelah reformasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan desentralisasi yang memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

Penguatan desentralisasi tersebut diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial budaya yang hidup di desa. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemanfaatan sumber daya desa.

Meskipun desentralisasi telah diperkuat secara normatif, dalam perkembangannya terdapat kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat melalui konsolidasi kebijakan dan pengetatan fiskal. Kebijakan prioritas nasional dan refocusing anggaran berdampak pada terbatasnya ruang diskresi daerah dan desa dalam menentukan arah pembangunan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan desa untuk tetap adaptif dan mampu mengoptimalkan potensi lokal agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif.

Dalam konteks desa, paradigma pembangunan mengalami perubahan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan desa yang mandiri. Pelaksanaan pemberdayaan perlu menggunakan pendekatan *bottom-up* dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana semakin efektif proses pemberdayaan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan desa wisata.

Desa wisata merupakan konsep pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal yang mengintegrasikan daya tarik alam, sosial, dan budaya desa menjadi satu kesatuan destinasi. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola potensi wilayahnya, meningkatkan kapasitas

kewirausahaan, serta mendorong keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan sinergi berbagai pihak melalui model penta helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Sinergi tersebut harus didukung oleh modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan nilai bersama agar kerja sama dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu contoh pengembangan desa wisata adalah Desa Wisata Noyo Gimbal View yang berada di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Setelah mengalami kegagalan pada pengelolaan wisata sebelumnya, pemerintah desa melakukan pembenahan manajemen melalui penguatan peran BUMDes, pelibatan masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan wisata ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Bangsri dari berkembang menjadi mandiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View, meliputi tiga tahapan pelaksanaan pemberdayaan serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai upaya

pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, pola, serta dinamika pemberdayaan yang terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut menunjukkan perkembangan signifikan melalui pengelolaan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Subjek penelitian terdiri atas Pemerintah Desa Bangsri, Bidang Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Blora, BUMDes Maju Mapan Bangsri, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan usaha dan potensi daya tarik wisata. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi desa, data pengunjung, dokumentasi kegiatan, data kependudukan, serta literatur pendukung seperti buku dan jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk memahami kondisi faktual di lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta dokumentasi sebagai pelengkap dan penguat data. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Untuk menjamin kualitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat

Merujuk pada Muliawan dalam Hendryantoro (2014:52), proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan utama yakni tahap sosialisasi, tahap transformasi, dan tahap kemandirian. Berdasarkan rangkaian temuan penelitian yang diperoleh, peneliti menilai bahwa Desa Wisata Noyo Gimbal View di Bangsri telah menerapkan ketiga tahapan tersebut dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, yang sekaligus berkontribusi terhadap optimalisasi pengembangan desa wisata.

1. Tahap Sosialisasi

Tahap pertama pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal View adalah tahap sosialisasi. Mengacu pada Muliawan dalam Hendryantoro (2014:52), sosialisasi merupakan proses awal untuk menyampaikan konsep dan rencana pengembangan desa wisata guna membangun kesadaran serta memperoleh dukungan masyarakat. Di Desa Bangsri, sosialisasi dilaksanakan secara terstruktur melalui forum musyawarah desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang diundang melalui RT. Dalam forum tersebut, pemerintah desa memaparkan konsep desa wisata, membuka ruang diskusi, serta menawarkan keterlibatan masyarakat, termasuk peluang berjualan dan berinvestasi.

Selain melalui forum formal, sosialisasi juga diperkuat dengan pendekatan personal melalui kunjungan langsung (sowan) ke rumah warga, khususnya pelaku UMKM. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan manfaat ekonomi desa wisata serta memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat,

seperti keterbatasan modal dan rendahnya penjualan. Pemerintah desa bahkan memfasilitasi akses permodalan, termasuk pendampingan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sebagai bentuk dukungan nyata terhadap partisipasi masyarakat.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam konteks adanya keraguan masyarakat akibat pengalaman pembangunan wisata sebelumnya yang kurang berhasil. Namun melalui musyawarah dan pendekatan dialogis, mayoritas masyarakat menyatakan dukungan terhadap pengembangan desa wisata. Keberhasilan sosialisasi tidak hanya tercermin dari persetujuan formal dalam forum desa, tetapi juga dari keterlibatan aktif pelaku UMKM yang mulai mempersiapkan usaha dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi wisata.

Gambar 1. Musyawarah Desa dan Sosialisasi Konsep Desa Wisata



Sumber : Pemerintah Desa Bangsri

2. Tahap Transformasi Kemampuan

Tahap pemberdayaan yang kedua adalah tahap transformasi kemampuan. Transformasi kemampuan dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu dukungan pendanaan dan penguatan kapasitas melalui pelatihan SDM. Berdasarkan temuan penelitian, kedua bentuk tersebut telah diterapkan dalam pengembangan desa wisata.

Transformasi melalui dukungan pendanaan direalisasikan dengan pemanfaatan dana

desa sebesar Rp200.000.000 pada tahun 2023 untuk pembangunan kawasan wisata. Dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga melalui skema padat karya tunai yang melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal. Skema ini memberikan dampak ekonomi langsung sekaligus menjadi sarana pembelajaran melalui praktik kerja nyata. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana mendorong peningkatan keterampilan, pengalaman kerja, serta rasa memiliki terhadap desa wisata sebagai hasil kerja kolektif.

Bentuk kedua transformasi diwujudkan melalui pelatihan dan pengembangan SDM yang telah dirintis sebelum desa wisata beroperasi. Pemerintah Desa Bangsri memberikan berbagai pelatihan di bidang pertanian, budidaya ikan, kesenian, sablon dan konveksi, serta pengelolaan UMKM sebagai bagian dari persiapan kapasitas masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya perencanaan yang berorientasi pada penguatan internal sebelum pemberdayaan ekonomi dilakukan secara luas. Namun demikian, pelatihan yang diberikan belum sepenuhnya disertai mekanisme evaluasi dan pendampingan berkelanjutan, sehingga aspek keberlanjutan peningkatan kapasitas masih perlu diperkuat.

Proses transformasi kemampuan juga diperkuat melalui pendampingan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Blora bekerja sama dengan Desa Wisata Institute Yogyakarta, yang memberikan pelatihan manajemen desa wisata, penyusunan paket wisata, hingga pelatihan digitalisasi dan konten kreator. Dukungan ini mendorong peningkatan profesionalitas pengelola desa wisata, khususnya dalam aspek promosi dan manajemen berbasis media sosial.

Selain pelatihan dan pendampingan, transformasi kemampuan di Desa Wisata Noyo Gimbal Bangsri juga bersifat inklusif. BUMDes sebagai pengelola melibatkan penyandang disabilitas, ODGJ, perempuan, dan pemuda dalam berbagai unit usaha, mulai dari percetakan, sablon, operasional wahana, hingga pengelolaan media sosial dan restoran. Pelibatan ini menunjukkan bahwa transformasi kemampuan tidak hanya berupa transfer pengetahuan, tetapi juga pemberian akses ekonomi secara langsung kepada kelompok masyarakat yang beragam.

3. Tahap Kemandirian

Tahap kemandirian dalam proses pemberdayaan ditandai dengan kemampuan masyarakat membentuk inisiatif secara mandiri, melahirkan inovasi, serta mengelola potensi sosial dan ekonomi tanpa ketergantungan pada pendampingan eksternal. Dalam konteks Desa Wisata Noyo Gimbal View, tahap ini tercermin dari kapasitas pengelola dan masyarakat dalam menjalankan operasional wisata secara berdikari, adaptif, dan kreatif.

Kemandirian terlihat dari tata kelola berbasis digital yang diterapkan sesuai AD/ART, pengelolaan UMKM yang memprioritaskan warga asli desa, serta minimnya ketergantungan pada pemerintah kabupaten. BUMDes berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan ruang usaha, sementara inisiatif ekonomi dijalankan langsung oleh masyarakat. Pelaku UMKM menunjukkan kemampuan ekspansi usaha, pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap fluktuasi kunjungan, hingga membuka lapangan kerja bagi warga lain. Hal ini menunjukkan bahwa desa wisata telah menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Aspek inovasi juga menandai tahap kemandirian. Pengelola secara mandiri merancang paket wisata, outing class, serta event bulanan dan tahunan seperti pertunjukan seni tradisional dan Festival Lampion. Inovasi tersebut memperkuat diferensiasi destinasi dan berdampak pada peningkatan kunjungan serta aktivitas ekonomi lokal. Data kunjungan tahun 2025 yang mencapai 348.362 wisatawan menunjukkan kemampuan desa dalam mempertahankan eksistensi pasar meskipun mengalami fluktuasi dibanding tahun sebelumnya. Capaian ini diperkuat dengan penghargaan Juara Harapan I Desa Wisata tingkat Provinsi Tahun 2025 serta peringkat ke-13 Lomba Desa Wisata Nasional 2023 oleh Kementerian Desa PDTT, yang mengindikasikan pengakuan eksternal atas kualitas pengelolaan.

Kemandirian juga tercermin dalam tata kelola yang responsif terhadap kritik dan dinamika lapangan. Pengelola terbuka terhadap evaluasi, cepat menangani persoalan fasilitas, serta melakukan penyesuaian kebijakan seperti evaluasi harga tiket melalui musyawarah bersama pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kapasitas pengambilan keputusan yang otonom dan adaptif.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan kebebasan penuh dalam menentukan jenis usaha. Pengaturan produk dagangan oleh pengelola, khususnya pembatasan penjualan makanan berat yang dipusatkan pada restoran BUMDes, menunjukkan bahwa ruang keputusan strategis masih berada dalam koridor kebijakan kelembagaan. Dari perspektif teori Muliawan, kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek kemampuan operasional dan

partisipasi aktif telah tercapai, tetapi dimensi otonomi ekonomi masih dalam proses penyesuaian.

Dengan demikian, tahap kemandirian di Desa Wisata Noyo Gimal Bangsri telah terwujud dalam bentuk kemampuan inovasi, pengelolaan usaha yang berdaya tahan, tata kelola responsif, serta pengakuan eksternal atas capaian desa wisata. Meskipun masih terdapat batasan struktural tertentu, secara substantif masyarakat telah menunjukkan kapasitas untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Gambar 2. Inovasi Event Wisata



Sumber : BUMDes Maju Mapan

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam proses pemberdayaan desa wisata, karena keberhasilan pengembangannya sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan warga. Dalam penelitian ini, partisipasi dimaknai sebagai keterlibatan masyarakat dalam seluruh rangkaian aktivitas pemberdayaan yang membentuk arah dan keberlanjutan desa wisata. Subbab ini membahas bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam pemberdayaan di Desa Wisata Noyo Gimal View.

Mengacu pada Deviyanti (2013:382), partisipasi masyarakat terbagi menjadi

partisipasi nyata dan partisipasi tidak nyata/abstrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bangsri terlibat secara nyata melalui dukungan tenaga dan operasional, serta secara abstrak melalui saran, musyawarah, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan desa wisata.

1. Partisipasi dalam Bentuk Nyata

Partisipasi masyarakat dalam bentuk nyata ditandai melalui keterlibatan langsung warga secara fisik dan tenaga dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimal. Selain kontribusi tenaga, sebagian masyarakat juga memberikan dukungan finansial untuk memperkuat pengembangan desa wisata. Keikutsertaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong penguatan tata kelola dan optimalisasi desa wisata, karena masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pengelolaan kegiatan wisata.

Partisipasi tenaga terlihat sejak tahap awal pembangunan, ketika warga terlibat dalam kegiatan fisik penyediaan sarana dan prasarana melalui gotong royong, termasuk pemindahan saung dari desa sekitar serta pelibatan warga sebagai tenaga kerja lokal. Pemerintah desa dan BUMDes memprioritaskan tenaga kerja dari masyarakat setempat, sehingga pembangunan desa wisata juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang luas, termasuk pemuda, pelaku UMKM, dan kelompok difabel. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada destinasi, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat secara inklusif.

Selain tenaga, partisipasi nyata juga diwujudkan dalam bentuk dukungan

finansial. Sebagian warga berperan sebagai investor wahana yang dikelola oleh BUMDes melalui sistem bagi hasil yang dilegalkan secara notarial, sehingga mencerminkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pada tingkat UMKM, partisipasi finansial terlihat melalui iuran sukarela untuk membantu sesama pelaku usaha saat terjadi musibah maupun untuk penyelenggaraan kegiatan seni guna menarik wisatawan. Partisipasi ini memperlihatkan adanya rasa memiliki, tanggung jawab kolektif, serta penguatan modal sosial dalam mendukung keberlanjutan desa wisata.

2. Partisipasi dalam Bentuk Tidak Nyata/Abstrak

Partisipasi masyarakat secara tidak langsung ditandai dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam forum musyawarah yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan evaluasi Desa Wisata Noyo Gimbal. Partisipasi ini diwujudkan melalui penyampaian ide, saran, dan pendapat, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi abstrak telah terlihat sejak tahap awal sosialisasi, yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat kehadiran dan dukungan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Proses perencanaan dilakukan secara bertahap, dimulai dari rapat internal pengelola, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh kritik dan saran, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam penetapan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya hadir secara formal, tetapi terlibat secara substantif dalam perumusan arah pengembangan desa wisata.

Selain pada tahap perencanaan, partisipasi abstrak juga terlihat dalam proses evaluasi

pengelolaan. BUMDes secara berkala menghimpun masukan dari warga dan pelaku usaha, baik melalui forum rapat maupun mekanisme penyampaian aspirasi melalui Ketua RT. Evaluasi kebijakan, seperti penyesuaian harga tiket masuk, dilakukan berdasarkan keluhan dan masukan pelaku usaha yang terdampak terhadap penurunan jumlah pengunjung. Keputusan penyesuaian harga diambil melalui musyawarah bersama, yang menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat memiliki pengaruh nyata dalam pengambilan kebijakan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan juga tampak ketika pengelola dan pelaku usaha bermusyawarah untuk menyelenggarakan kegiatan seni guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Diskusi dilakukan melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi seperti grup WhatsApp, dengan prinsip sukarela dan mufakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan sebagai subjek dalam menentukan arah pengelolaan dan pengembangan desa wisata, sehingga partisipasi abstrak yang terbangun memperkuat tata kelola yang dialogis dan partisipatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal Bangsri telah berlangsung secara bertahap dan sistematis sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Muliawan dalam Hendryantoro (2014), yang meliputi tahap sosialisasi, transformasi kemampuan, dan kemandirian. Pada tahap sosialisasi, pemerintah desa dan BUMDes berhasil membangun kesadaran serta dukungan

masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan personal sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pengembangan desa wisata. Tahap transformasi kemampuan diwujudkan melalui pemanfaatan dana desa dalam program padat karya tunai, pelatihan, serta pendampingan yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia secara inklusif dengan melibatkan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan. Namun demikian, aspek evaluasi dan pendampingan berkelanjutan pasca pelatihan masih perlu diperkuat agar dampak pemberdayaan lebih optimal. Tahap kemandirian tercermin dari kemampuan masyarakat dalam mengelola UMKM, mengembangkan inovasi wisata, menyelenggarakan event budaya, serta menerapkan tata kelola yang adaptif dan responsif. Capaian ini diperkuat dengan adanya pengakuan di tingkat provinsi dan nasional. Meskipun demikian, kemandirian yang terbangun masih dominan pada aspek operasional, sedangkan ruang kemandirian dalam pengambilan keputusan ekonomi strategis, terutama kebebasan pelaku UMKM dalam menentukan jenis dagangan, masih relatif terbatas.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Noyo Gimbal Bangsri telah berlangsung secara optimal ke dalam dua bentuk sebagaimana dikemukakan oleh Deviyanti (2013), yaitu partisipasi nyata dan partisipasi tidak nyata atau abstrak. Partisipasi nyata terlihat melalui keterlibatan tenaga, dukungan finansial, serta peran masyarakat sebagai pelaku UMKM, tenaga kerja, dan investor lokal dalam pembangunan dan operasional desa wisata. Sementara itu, partisipasi abstrak diwujudkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah, penyampaian ide dan pendapat, evaluasi program, serta

pengambilan keputusan secara mufakat. Mekanisme komunikasi yang terbuka menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang berperan dalam menentukan arah pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, sinergi antara proses pemberdayaan yang terstruktur dan partisipasi masyarakat yang aktif menjadi faktor utama dalam mendukung pengembangan desa wisata tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa dan BUMDes perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang telah diberikan kepada masyarakat guna mengukur sejauh mana materi pelatihan dapat dipahami dan diterapkan dalam praktik pengelolaan desa wisata maupun usaha UMKM. Pelaksanaan pelatihan juga sebaiknya disertai dengan pendampingan berkelanjutan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tidak berhenti pada tahap transfer pengetahuan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Selain itu, dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi pelaku UMKM, pengelola desa wisata perlu mempertimbangkan pemberian keleluasaan yang lebih proporsional dalam aktivitas berjualan dengan tetap menjaga keseimbangan tata kelola, misalnya melalui pengaturan jenis dagangan yang tidak secara langsung menyaingi unit usaha milik BUMDes. Pengaturan yang jelas dan disepakati bersama diharapkan dapat mendorong kreativitas dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM tanpa mengganggu keberlanjutan usaha desa lainnya. Di sisi lain, pengelola desa wisata juga perlu terus berinovasi dalam membaca

peluang kunjungan wisatawan guna mempertahankan bahkan meningkatkan jumlah pengunjung, salah satunya melalui pengembangan event musiman yang disesuaikan dengan momentum tertentu serta penyesuaian waktu operasional sesuai kebutuhan wisatawan. Dengan demikian, penerapan evaluasi dan pendampingan berkelanjutan, perluasan ruang kemandirian usaha, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan dan karakter wisatawan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola desa wisata serta menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah et al., 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang Sumatera Barat. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Aribowo, Gatot. 2024 (November, 12). Inspirasi Bangsri: Dari Kampung Pelangi berubah jadi Naya Gimbal. Wartablora.com.
<https://desa.wartablora.com/ekonomi-bisnis/inspirasi-bangsri-dari-kampung-pelangi-berubah-jadi-naya-gimbal-tASl09u-14297>.
- Deviyanti, Dea. 2013. “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”. *E-Journal Administrasi Negara*. Vol. 1 (2).
- Hendryantoro, Anggun. 2014. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya”. *Jurnal Ketahanan Nasional*.
- Nurwanda Musthafa Is et al., 2022. “Analisis Upaya Pemberdayaan Desa Wisata Pandanrejo Dalam Keberhasilan Menjadi 50 Desa Wisata Unggulan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021”. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 12 (1).
- Suriadi, Hadi., et al. 2023. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia”. *Jurnal Media Ilmu*. Vol 2 (2).